

BAB IV

KESIMPULAN

Jepang adalah negara yang maju dan modern, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional yang masih kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat Jepang yang modern. Kebudayaan Jepang yang memiliki keunikan tersendiri yang terkenal hampir di seluruh dunia, budaya-budaya tersebut meliputi pakaian tradisional yaitu *kimono* dan *yukata*, upacara minum teh yakni *chadou* atau *shadou*, *origami*, *ikebana*, *furoshiki* dan lain-lain, serta karakter masyarakat Jepang yang ramah, sopan, tepat waktu, pekerja keras, taat pada peraturan dan memiliki rasa malu yang tinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk melihat langsung dan berkunjung ke Jepang, tak terkecuali bagi wisatawan Muslim yang kini telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah Jepang. Ada beberapa kendala bagi pemerintah Jepang dalam mengembangkan industri pariwisata halal di Jepang yaitu, sulitnya menemukan makan dan minuman halal, masjid atau tempat sholat jumlahnya masih sangat sedikit, masyarakat Jepang yang cenderung tertutup sehingga sulit dapat menerima budaya lain, di Jepang Islam juga adalah agama minoritas, sehingga dengan keadaan ini membuat pemerintah Jepang berusaha lebih keras lagi untuk mengembangkan potensi pariwisata halal.

Pemerintah Jepang tidak berdiam diri melihat potensi pasar wisatawan Muslim yang besar ini. Memanfaatkan momentum *event* besar Olimpiade Tokyo 2020 nanti, dengan membidik pasar potensial wisatawan Muslim, pemerintah Jepang melakukan strategi-strategi untuk lebih mengangkat nama negara Jepang (*Nation Branding*) dengan tujuan agar lebih dikenal khususnya oleh wisatawan Muslim dan agar lebih ramah kepada wisatawan Muslim (*Moeslem"s Friendly*). Industri pariwisata halal di Jepang ternyata berpengaruh terhadap perkembangan wisatawan Muslim yang datang ke Jepang dari seluruh penjuru dunia jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah terbesar dari wisatawan adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim adalah Malaysia dan Indonesia. Sebanyak

158.500 orang Malaysia datang pada sembilan bulan pertama di tahun 2014 lalu, atau naik 52,3% dan jumlah turis Indonesia naik 13,4% menjadi 111.400 orang.

Hal ini membuat pemerintah Jepang melakukan beberapa strategi agar jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Jepang terus meningkat dengan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan Muslim, seperti mempermudah urusan visa, menyediakan makanan dan minuman halal, menyiapkan ruang sholat di beberapa tempat, fasilitas penginapan ramah Muslim yang menyediakan menu makanan halal, ruangan untuk sholat lengkap dengan penunjuk arah kiblat, mengembangkan fitur aplikasi halal, membuat website khusus pariwisata halal dan lain sebagainya. Pemerintah Jepang mendukung penuh upaya-upaya untuk menarik wisatawan Muslim melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan guna meningkatkan jumlah wisatawan Muslim agar berkunjung ke Jepang. Pariwisata Jepang secara keseluruhan hampir mampu menyamai industri alat-alat listrik dan industri otomotif. Jepang menempati peringkat yang cukup baik posisinya dan terus meningkat di antara negara non-OIC (*Organization of Islamic Conference*)/OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam usahanya untuk mengembangkan pariwisata halal.

Pariwisata seringkali hanya dikaitkan dengan bingkai ekonomi saja, padahal sebenarnya pariwisata merupakan serangkaian dari kekuatan ekonomi, lingkungan sosial budaya yang bersifat global. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan pengelolaan secara maksimal maka akan diperoleh keuntungan yang maksimal bagi pemerintah Jepang dan masyarakatnya. Selain meningkatkan devisa negara, pariwisata juga merupakan industri padat karya yang melibatkan banyak pihak untuk terlibat dalam pengembangannya baik langsung ataupun tidak langsung. Tidak hanya sektor ekonomi, akan tetapi sektor sosial dan sektor budaya juga ikut mendapatkan dampak positifnya sehingga potensi pariwisata halal Jepang dapat dimaksimalkan dengan melakukan strategi-strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang. Seluruh strategi yang dilakukan tidak akan dapat bertahan lama apabila tidak adanya pengawasan dan evaluasi dari pihak pemerintah Jepang.